

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab terdahulu, peneliti menyimpulkan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa anak di luar perkawinan yang sah, baik yang termasuk kategori nikah *fâsid*, *watha`* syubhat di kalangan *fuqa â`*, dinasabkan kepada ayah dan ibunya. Adapun anak zina dapat dinasabkan kepada ayah yang melakukan zina dengan ibunya, beserta semua hak dan kewajiban yang menyertainya, dengan syarat ibu anak tersebut tidak melakukan zina dalam keadaan sedang terikat *firâsy* dengan laki-laki lain, ayah mengakui anak itu sebagai anaknya, anak itu tidak di-*li'ân* oleh suami sah (pemilik *firâsy*) dari ibunya, serta *add* zina dijalankan.
2. Metode dalam penetapan nasab dari anak dari nikah *fâsid* dan *watha`* syubhat tidak dikemukakan secara khusus oleh Ibn al-Qayyim, karena anak zina saja, menurutnya tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya. Ada Tiga metode penetapan hukum (*ushûl istinbâth*) dominan digunakan Ibn al-Qayyim pada penetapan nasab anak zina tersebut:
 - a. *Al-nushûsh*, khususnya Sunnah, karena tidak ada dalil al-Qur'an spesifik tentang nasab anak zina. Sunnah yang menafikan nasab kepada ayah biologis hanya hadis yang menyebut “*Kalau ia dilahirkan budak perempuan yang tidak dimiliki ayah atau perempuan merdeka yang berzina dengannya, maka anak tidak di-istil âq dan tidak mewarisi. Kalau*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayah mengakuinya, maka anak itu adalah anak zina, baik perempuan itu merdeka atau seorang budak”, salah satunya diriwayatkan Abû Dâwud. Tetapi hadis ini diragukan validitas *sanad*-nya, karena salah satu *râwî*-nya, Mu ammad bin Râsyid al-Mak ûlî, tidak disepakati ke-*tsiqâ* -annya.

- b. Karena tidak ada *ijmâ’* dalam hal ini, Ibn al-Qayyim “langsung” merujuk ke fatwa *tâbi’in*, yaitu ‘Urwa bin al-Zubayr (w. 94 H), Sulaymân bin Yasâr (w. 110 H), al- asan al-Bashrî (w. 110 H), dan Is âq bin Râ away (w. 237 H) yang menyatakan anak hasil zina bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya, kalau si ayah mengakui si anak sebagai buah zinanya.
 - c. Selain fatwa *tâbi’in*, Ibn al-Qayyim juga menguatkan pendapatnya dengan *qiyâs sha î* atau *al-mîzân*, yang termasuk kelompok *qiyâs al-thard*. Penyamaan itu dilakukan antara ibu dari anak atau pelaku zina perempuan (*ashl*) dengan ayah biologisnya atau pelaku zina lelaki (*far’*). Sebab, anak tersebut tumbuh (mengada) dari “air” mereka berdua (*ilat*); jika anak tersebut bernasab kepada ibu biologis dan kerabatnya (hukum *ashl*), maka ia juga bernasab kepada ayah biologis dan kerabatnya. Hal itu diperkuat dengan kenyataan bahwa anak tersebut tidak seorangpun mengakuinya sebagai anaknya, baik yang bertalian *firâsy* dengan ibunya atau tidak.
3. Dari tiga bentuk relevansi yang dimungkinkan (material, substantif, dan metodologis), pendapat Ibn al-Qayyim tentang nasab anak di luar perkawinan yang sah hanya memiliki relevansi substantif (*on-topic*) dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Persamaan substansi tersebut terdapat pada dua hal:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penegasan bahwa anak di luar nikah memiliki “hubungan darah”, hubungan “keperdataan”, atau “hubungan nasab” dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya. Dengan kata lain, anak luar kawin (anak zina) adalah anak sah dari pelaku *coitus* di luar kawin (*al-zânî; al-‘â ir*). Kecuali menurut Ibn al-Qayyim jika ibu dari anak itu berzina dalam keadaan ia terikat *firâsy* dari laki-laki lain, anak itu telah di-*li’ân*, atau ayah dari anak tersebut tidak mengakuinya sebagai anak, dan *add zina* dijalankan.
 - b. Hubungan hukum anak di luar kawin dengan ayah biologisnya itu memunculkan “hak dan kewajiban secara bertimbalbalik”. Tidak satupun dari hak dan kewajiban mereka (anak, ibu, dan bapak) yang “tertahan” karena perbuatan *coitus* di luar kawin yang telah terjadi.
4. Menurut penulis, anak dari nikah *fâsid* dan *watha`* syubhat dinasabkan kepada ayah dan ibu biologisnya. Mengenai anak zina, jika *add zina* dijalankan, anak tersebut dinasabkan kepada ayah dan ibu biologisnya, dengan syarat ibu anak tersebut tidak melakukan zina dalam keadaan sedang terikat *firâsy* dengan laki-laki lain, ayah mengakui anak itu sebagai anaknya, anak itu tidak di-*li’ân* oleh suami sah (pemilik *firâsy*) dari ibunya. Jika *add zina* dijalankan, anak tersebut tetap dinasabkan kepada ayah dan ibu biologisnya, tetapi ayah dan ibunya tidak mempunyai hak apa-apa dari anak biologisnya tersebut, berdasarkan *istinbâth bayânî* dan *istinbâth ta’lîlî*.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Kesimpulan dan temuan penelitian dapat berimplikasi terhadap beberapa norma hukum yang terdekat dengannya, di antaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendapat Ibn al-Qayyim yang mengesahkan hubungan hukum anak zina terhadap kedua orang tuanya dengan segala konsekwensinya, kecuali menurut Ibn al-Qayyim jika ibu dari anak itu berzina dalam keadaan ia terikat *firâsy* dari laki-laki lain, anak itu telah di-*li'ân*, atau ayah dari anak tersebut tidak mengakuinya sebagai anak, berarti pada sebagian keadaan juga menyamakan zina dengan nikah dalam hal penetapan hubungan nasab yang sah dengan segala konsekwensinya.
2. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang juga berimplikasi pada perubahan konsep anak sah yang diatur Pasal 42 UU Perkawinan yang **harus dibaca** menjadi “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah atau dilahirkan di luar perkawinan yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum*”.
3. Walau secara substantif pendapat Ibn al-Qayyim dan Putusan MK memunculkan hubungan hukum yang sama, tapi dari sisi mudaratnya (berupa pembukaan “pintu” zina) jelas pendapat Ibn al-Qayyim untuk masanya jauh lebih kecil, karena di masa itu sanksi zina di jalankan penuh dan Ibn al-Qayyim sendiri menyatakan perbuatan zina harus dikenai sanksi berat. Sementara dalam kondisi Indonesia yang tidak “mengadopsi” semangat hukum pelarangan zina, jelas putusan MK semakin mempersubur budaya tidak taat hukum, khususnya hukum Islam.
4. Implikasi lanjutannya, cita-cita untuk menyelamatkan anak-anak yang terdiskriminasi secara hukum, terutama secara sosial, akan semakin berat dan semakin kompleks. Sebab, legalisasi tanpa penerapan sanksi tersebut akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat berpeluang memperbesar jumlah anak-anak di luar nikah dengan kasus dan persoalan yang semakin beragam.

5. Untuk meminimalisir semua eksekusi negatif itu, apalagi dalam kondisi ketiadaan sanksi zina, solusi terbaik untuk penyelamatan anak di luar nikah adalah dengan menetapkan semua hak yang mesti ia terima sebagai anak dan, dalam rangka meminimalisir hubungan luar nikah, dengan meniadakan semua hak yang mungkin diperoleh oleh kedua orangtuanya yang melakukan zina dari anak tersebut.
6. Bagaimanapun, anak-anak di luar kawin tidak akan pernah bisa terselamatkan secara maksimal selama penyebab kelahiran mereka (*coitus* di luar nikah) tidak dihilangkan atau, minimal, diminimalisir. Hal itu, merujuk pada norma hukum yang sudah ada, dapat dilakukan dengan menetapkan larangan tegas dan sanksi hukum bagi para pelaku *coitus* di luar nikah.

C. Saran

Berangkat dari bahasan, simpulan dan temuan penelitian, dirasa perlu menyampaikan beberapa saran untuk orang dan lembaga terkait, sebagai berikut:

1. Terhadap umat Islam, khususnya Indonesia, disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam, serta mengamalkannya secara konsisten dan kontinyu. Sebab hanya Allah yang mengetahui hakikat ideal ajaran-Nya, sedang para *mujta id* dan penegak hukum hanya berupaya sebatas kemampuan yang ia miliki. Adalah mustahil mengharapkan cita-cita ideal terwujudnya masyarakat Islam itu terlaksana sekali jadi saat ini.
2. Bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam hal legislasi dan penegakan hukum termasuk Hakim, khususnya terkait masalah hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga, agar lebih mengedepankan prinsip-prinsip syariah (*maqâshid al-syarî'a*). Dalam negara yang memberikan jaminan penuh untuk melaksanakan ajaran agama, termasuk Islam, sudah saatnya untuk memprioritaskan sikap kelebihan-sesuaian dengan prinsip yang lebih hakiki dari ajaran Islam; dibanding hanya “menukar” ajaran dan konsep Islam dengan keuntungan duniawi yang menipu (*ghurûr*). Sebab, upaya justifikasi sesuatu yang tidak *justice* (*îla*), pada dasarnya hanyalah upaya menipu diri sendiri.

3. Sebagai sebuah metode penemuan hukum, secara teoritis *qiyâs* sangat mengedepankan kesesuaian hukum *far'* dengan tuntutan dalil yang jadi *ashl*-nya, yaitu *nash* al-Qur'an dan Sunnah. Dalam kaitan ini, para pemangku kebijakan di bidang hukum dituntut untuk merujuk langsung ke kedua sumber itu. Hal ini perlu dilakukan, selain menjadi tuntutan konsistensi ketauhidan, juga dalam rangka memaksimalkan penemuan hubungan (*nisba*) semangat zaman (saat ini dan di sini) dengan dalil yang tidak tergerus zaman.

4. Bagi para akademisi dan peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam sekaitan dengan masalah ini, khususnya terkait “penurunan” *qiyâs sha'î* Ibn al-Qayyim menjadi metode perumusan hukum positif Indonesia. Hal ini adalah sangat penting, agar bangunan hukum Islam yang telah berdiri, khususnya bidang hukum keluarga, memiliki kerangka metodologis yang valid dan aplikatif untuk menyangga keberadaannya sebagai sebuah sistem hukum.

5. Kepada pemerintah diharapkan adanya kemauan politik (*political will*) untuk memenuhi amanat UUD 1945 sekaitan dengan upaya mendukung pelaksanaan ajaran Islam secara *kâffa* oleh para pemeluknya. Jangan bersikap

“tebangpilih” menguatkan bagian-bagian yang “dianggap” menguntungkan saja. Di samping itu, juga diharapkan adanya sosialisasi maksimal peraturan perundang-undangan yang telah dikodifikasi kepada masyarakat, agar rakyat Indonesia yang mayoritas muslim menyadari bahwa ajaran agamanya sudah menjadi bagian dari sistem hukum negaranya; meminimalisir polarisasi “hukum agama dan hukum negara”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.